

**ANALISIS YURIDIS KASUS PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN  
PT FREEPORT INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 316/B/PK/Pjk/2018)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Togu Ericson Arifin  
2040057017**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**ANALISIS YURIDIS KASUS PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN  
PT FREEPORT INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 316/B/PK/Pjk/2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh:**

**Togu Ericson Arifin  
2040057017**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



### VISI DAN MISI

**VISI :** Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

**MISI :**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lain.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Togu Ericson Arifin  
NIM : 2040057017  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “**Analisis Yuridis Kasus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT Freeport Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 316/B/PK/Pjk/2018**” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 06 Juli 2023



**Togu Ericson Arifin**  
**NIM : 2040057017**





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Oleh**

**Nama** : Togu Ericson Arifin  
**NIM** : 2040057017  
**Program Studi** : Hukum  
**Peminatan/Program Kekhususan** : Hukum Administrasi Negara  
**Judul** : Analisis Yuridis Kasus Pajak Pemanfaatan  
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT  
Freeport Indonesia Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung No: 316/B/PK/Pjk/2018

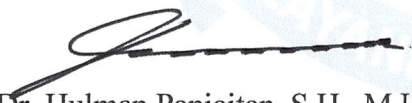
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 06 Juli 2023

Menyetujui:


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

NIDN 0020096802



Tomson Situmeang, S.H., M.H.

NIDN 0325028101

Ketua Program Studi Hukum



Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

NIDN 0327046303



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN 0302117904





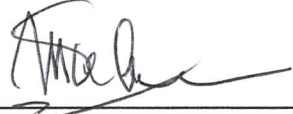
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 6 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : Togu Ericson Arifin  
**NIM** : 2040057017  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul** : Analisis Yuridis Kasus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT Freeport Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 316/B/PK/Pjk/2018

oleh tim penguji yang terdiri dari :

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Ketua	
Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.Hum.	Anggota	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.  
NIDN 0302117904



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Togu Ericson Arifin  
NIM : 2040057017  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul :

**Analisis Yuridis Kasus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT Freeport Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 316/B/PK/Pjk/2018”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal 06 Juli 2023  
Yang menyatakan



Togu Ericson Arifin



## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Kasus Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT Freeport Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 316/B/PK/Pjk/2018”**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana Strata-1 (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Di dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan petunjuk, masukan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum.
6. Radisman Saragih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Staff Tendik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.



9. Christina Julinda Alfianty, istri saya yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan studi saya.
10. Keluarga besar penulis yang selalu memberi support dalam penyelesaian studi di FH UKI.
11. Rekan AWS, CTS, ENA, MAA, NBT, ES, JM, DK, LS, keluarga besar FE UAJ dan kolega-kolega.
12. Kawan FH UKI angkatan 2020, 2019 & 2021.
13. Kepada semua pihak yang turut membantu di dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima komentar dan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari.

***“Rechtsidee : Gerechtigheids ; Doelmatigheid ; Rechtmatigheid”***

***“Wetmatigheid”***

***“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali”***

Jakarta, 06 Juli 2023



Togu Ericson Arifin

## DAFTAR ISI

<b>VISI DAN MISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	5
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian, Syarat-syarat Pemungutan, Fungsi dan Jenis-jenis Pajak.....	22
B. Pajak Daerah .....	32

C. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah .....	34
D. Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya.....	36
E. Kontrak Karya.....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>KEDUDUKAN/ KEKUATAN MENGIKAT SUATU PERJANJIAN</b>	
<b>DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
<b>DALAM PERSPEKTIF ILMU PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>50</b>
A. Perjanjian Sebagai Undang-Undang Swasta.....	50
B. Kekuatan Mengikat Kontrak Karya Dalam Perspektif Ilmu Perundang-undangan. ....	57
C. Kontrak Karya Pertambangan Dalam Perspektif Perpajakan. ....	67
D. Analisis atas Kedudukan/ Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian Dibandingkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan. ....	76
<b>BAB IV.....</b>	<b>78</b>
<b>PENERAPAN HUKUM PERPAJAKAN DALAM PERKARA MA NOMOR</b>	
<b>316/B/PK/PJK/2018 .....</b>	<b>78</b>
A. Kasus Posisi .....	78
B. Penerapan Hukum Perpajakan dalam Perkara MA No. 316/B/PK/PJK/201884	
C. Analisis Penerapan Hukum Perpajakan dalam Perkara MA No. 316/B/PK/PJK/2018.....	91
<b>BAB V.....</b>	<b>100</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

## ABSTRAK

- A. Nama : Togu Ericson Arifin
- B. NIM : 2040057017
- C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum / Hukum
- D. Judul : ANALISIS YURIDIS KASUS PAJAK  
PEMANFAATAN AIR BAWAH  
TANAH DAN AIRPERMUKAAN PT  
FREEPORT INDONESIA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 316/B/PK/Pjk/2018)
- E. Halaman : i-ix 103 Halaman + Daftar Pustaka +  
Lampiran
- F. Kata Kunci : Kasus Pajak Pemanfaatan Air, UU Pajak  
dan PT Freeport Indonesia
- G. Ringkasan Isi :

Permasalahan PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak sebatas pada divestasi saham, salah satu permasalahan adalah mengenai Sengketa Pajak Air yang melibatkan PTFI. Sengketa ini diawali dari dikeluarkannya SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan) dari Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2011 hingga 2017 sebesar Rp 22,922 triliun. Dasar hukum penagihan Pajak Air Permukaan yang dilakukan Pemprov Papua adalah Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi Papua berhak untuk melakukan penarikan pajak kepada PTFI berdasarkan pasal 94 ayat (4) Undang-Undang No. 28 thn 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Dalam Perda tersebut, tarif pajak yang dikenakan Pemerintah Provinsi Papua kepada PTFI sebesar Rp 120 per meter kubik per detik untuk tiap pengambilan air. Selain itu, ditetapkan juga oleh Pemerintah Provinsi Papua tarif Pajak Pemanfaatan Air Permukaan sebesar 10% dari jumlah volume air bawah tanah, atau air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan dengan pembayarannya setiap bulan. Namun PTFI tidak bersedia membayar pajak air tersebut dikarenakan PTFI berpedoman pada



aturan dalam kontrak karya (KK), yang hanya mengakui tarif pajak yang berlaku pada saat ditanda-tanganinya KK pada tahun 1991 dimana sebesar Rp 10 per meter kubik per detik atas penggunaan air permukaan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yuridis normatif, mempergunakan pendekatan perundang-undangan, data sekunder, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen.

Kedudukan/ kekuatan mengikat suatu perjanjian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu perundang-undangan adalah bahwa perjanjian sebagai undang-undang swasta, sebagai undang-undang swasta perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya tidak bersifat *Erga Omnes* atau berlaku bagi semua orang. Kemudian terdapat kesalahan penerapan hukum di tingkat Pengadilan Pajak yang kemudian diadili oleh Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali dimana Majelis Mahkamah Agung memberikan pertimbangan Kontrak Karya Pertambangan hendaknya dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu kesepakatan mengenai perpajakan yang disepakati dalam Kontrak Karya adalah *lex specialis* sehingga ketentuan perpajakan Republik Indonesia menundukkan diri pada kesepakatan dalam Kontrak Karya.

- H. Daftar Acuan : 45 buku, 11 buku perundang-undangan,  
3 jurnal/artikel
- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Juni 2023

Penulis,



Togu Ericson Arifin

## ABSTRACT

- A. Name of Student : Togu Ericson Arifin
- B. Student Identification Number : 2040057017
- C. Specialization Program : Law / Law
- D. Thesis Title : *Juridical Analysis Of The Cases Of The Utilization Of Land Water And Surface Water Of PT Freeport Indonesia (Case Study Of The Supreme Court Number 316/B/PK/PJK/2018)*
- E. Number of Pages : i-ix 103 pages + Bibliography + Attachment
- F. Keywords : Water Utilization Tax Case, Tax Law, and PT Freeport Indonesia
- G. Content Summary :

PT PT Freeport Indonesia's (PTFI) problems are not limited to the divestment of shares, one of the problems is regarding the Water Tax Dispute involving PTFI. This dispute began with the issuance of SKPD PAP (Regional Tax Assessment Letter for Surface Water Tax) from the Provincial Government of Papua from 2011 to 2017 in the amount of IDR 22.922 trillion. The legal basis for collecting Surface Water Tax by the Papua Provincial Government is the Regional Government Regulation of the Papua Province Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes, The Provincial Government of Papua has the right to withdraw taxes from PTFI based on Article 94 paragraph (4) of Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. In this regulation, the tax rate imposed by the Papua Provincial Government on PTFI is IDR 120 per cubic meter per second for each water withdrawal. In addition, the Provincial Government of Papua also stipulates a Surface Water Utilization Tax rate of 10% of the total volume of groundwater, or surface water that is taken and utilized by paying it every month. However, PTFI was not willing to pay the water tax because PTFI was guided by the provisions in the Contract of Work (CoW), which only recognized the tax rate that was in effect at the time the

CoW was signed in 1991 which amounted to IDR. 10 per cubic meter per second for the use of surface water.

The research methodology employed in writing this thesis is a normative juridical research method with a statutory approach. The data utilized includes secondary data, primary legal materials, as well as secondary and tertiary legal sources, employing document study techniques for data collection.

The binding position/force of an agreement compared to statutory regulations in the perspective of the science of law is that the agreement as a private law, as a private law the agreement is only binding on the parties making it not Erga Omnes in nature or apply to everyone. Then there was an error in applying the law at the Tax Court level which was then tried by the Supreme Court at the Judicial Review level where the Supreme Court Council gave consideration to Mining Contracts of Work that should be equated with Laws, therefore the agreement regarding taxation agreed in Contracts of Work is *lex specialis* so the tax provisions of the Republic of Indonesia comply with the agreements in the Contract of Work.

- H. Reading List : 45 books, 11 legislations, 3 journals/articles
- I. Supervisor Lecturer I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
- Supervisor Lecturer II : Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, June 26<sup>th</sup> 2023

Thesis writer,



Togu Ericson Arifin